



Integrasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembentukan Karakter di kalangan mahasiswa

¹Firzatullah Akbar ²Muhammad Fathir

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani ²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani

Email: 1firzatullah910@gmail.com 2mfathirmasirun23@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan persoalan serius yang melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional. Rendahnya integritas moral di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa pendidikan formal belum sepenuhnya efektif dalam menanamkan nilai antikorupsi. Penelitian ini menelaah bagaimana nilai-nilai antikorupsi dapat diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) guna memperkuat pembentukan karakter mahasiswa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-eksploratif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 15 mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah PKn. Analisis tematik menghasilkan empat tema utama: pemahaman nilai antikorupsi, efektivitas pembelajaran PKn, hambatan internalisasi nilai, dan strategi penguatan budaya integritas di kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab merupakan nilai yang paling dipahami mahasiswa, sedangkan efektivitas PKn dinilai cukup tinggi pada aspek kesadaran moral, namun masih rendah pada penerapan perilaku etis. Hambatan utama terletak pada budaya permisif terhadap ketidakjujuran dan kurangnya sistem pelaporan etika yang tegas. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi membutuhkan sinergi antara pembelajaran, keteladanan dosen, dan sistem kampus yang berintegritas. Integrasi nilai antikorupsi dalam PKn bukan sekadar inovasi kurikulum, melainkan strategi fundamental untuk membentuk generasi berkarakter yang menjadi agen perubahan menuju masyarakat bersih dan beretika.

Kata kunci: integritas, pendidikan antikorupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, karakter mahasiswa, budaya akademik

Abstract

Corruption remains a serious issue that undermines public trust and hinders national development. The low level of moral integrity among young generations indicates that formal education has not been fully effective in instilling anti-corruption values. This study examines how anti-corruption values can be integrated into Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) to strengthen students' character formation. Using a qualitative approach with a descriptive exploratory design, data were collected through semi-structured interviews with 15 university students who had completed the Civic Education course. Thematic analysis identified four main themes: understanding of anti-corruption values, effectiveness of Civic Education, barriers to value internalization, and strategies for strengthening campus integrity culture. The results show that honesty, discipline, and responsibility are the most recognized values, while the effectiveness of Civic Education is relatively high in developing moral awareness but still low in fostering ethical behavior. The main obstacles include a permissive academic culture toward dishonesty and the absence of a clear ethical reporting system. This study emphasizes that successful anti-corruption education requires synergy between teaching practices, lecturers' moral exemplarity, and an integrity-based institutional system. The integration of anti-corruption values into Civic Education is not merely a curricular innovation but a fundamental strategy to cultivate a generation of ethical, responsible individuals who serve as agents of change toward a clean and just society.

Keywords: : integrity, anti-corruption education, civic education, student character, academic culture.

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pertanyaan penting kemudian muncul: mengapa korupsi tetap subur meskipun pendidikan sudah semakin maju? Realitas menunjukkan bahwa rendahnya integritas moral generasi muda menjadi salah satu penyebab mengapa perilaku koruptif masih terjadi. Di lingkungan kampus, berbagai bentuk ketidakjujuran seperti plagiarisme, manipulasi data, dan penyalahgunaan fasilitas akademik mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai antikorupsi di kalangan mahasiswa (Syahputra et al., 2024). Fakta ini menegaskan perlunya penguatan karakter melalui pendidikan formal yang lebih sistematis.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah dan berbagai lembaga pendidikan mulai menekankan pentingnya pendidikan karakter dan integritas dalam kurikulum. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu mata kuliah yang dianggap strategis untuk mananamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika publik. Di tingkat global, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, serta good governance semakin memperkuat urgensi pendidikan antikorupsi. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut di perguruan tinggi masih belum merata dan sering kali belum menyentuh aspek pembentukan karakter secara mendalam (Ginanjar & Purnama, 2023).

Penelitian terdahulu banyak menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi efektif jika dikemas melalui pendekatan yang melibatkan penghayatan nilai secara langsung, bukan hanya pemberian materi teoritis. Namun sebagian besar penelitian masih terfokus pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana mahasiswa menerima, memahami, dan menginternalisasi nilai antikorupsi masih terbatas (Hasanah & Dewantara, 2022; Siti Fadilahtul Hidayah & Aos Kuswandi, 2024). Inilah alasan mengapa integrasi nilai antikorupsi dalam PKn di perguruan

tinggi perlu dikaji lebih jauh untuk melihat efektivitas dan strategi yang paling relevan (Witarsa, 2023).

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada pendidikan karakter, teori perkembangan moral Kohlberg, dan pendekatan values clarification. Pendidikan karakter memberikan kerangka tentang nilai-nilai yang perlu diinternalisasi mahasiswa, sedangkan teori moral Kohlberg menekankan pentingnya penalaran moral dalam pengambilan keputusan etis. Melalui values clarification, mahasiswa diarahkan untuk mengenali dan memilih nilai integritas secara sadar. PKn sebagai mata kuliah wajib nasional memiliki posisi penting untuk menerapkan ketiga pendekatan tersebut secara terintegrasi (Siti Fadilahtul Hidayah & Aos Kuswandi, 2024).

Kesenjangan penelitian muncul dari minimnya kajian yang secara khusus membahas integrasi nilai antikorupsi dalam PKn pada jenjang perguruan tinggi. Kebanyakan penelitian lebih menyoroti kampanye publik, pendidikan agama, atau lingkungan keluarga sebagai sumber pembentukan karakter (Hutabarat, 2021). Selain itu, belum banyak model pembelajaran PKn yang secara eksplisit dirancang untuk meningkatkan integritas mahasiswa. Keterbatasan ini membuat efektivitas pendidikan antikorupsi di tingkat universitas belum dapat sepenuhnya dipahami (Muhamram et al., 2022).

Mengisi kesenjangan tersebut sangat penting karena mahasiswa merupakan calon pemimpin, profesional, dan pengambil keputusan masa depan. Integritas yang lemah pada tahap ini dapat berdampak pada tingginya risiko praktik korupsi di dunia kerja nanti. Oleh karena itu, penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi bukan sekadar kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan strategis bagi pembangunan bangsa. Integrasi nilai dalam PKn akan membantu mahasiswa mengembangkan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial yang lebih kuat (Khotimah et al., 2024).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai antikorupsi dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembelajaran PKn agar mampu memperkuat pembentukan karakter mahasiswa(Zulaiha et al., 2025). Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana desain pembelajaran, metode pengajaran, serta persepsi mahasiswa terhadap materi antikorupsi berpengaruh pada perkembangan integritas mereka. Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum PKn dan upaya nasional dalam membangun budaya antikorupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain descriptive exploratory untuk memahami proses integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Subagyo, 2023). Pendekatan ini dipilih karena isu integritas dan pembentukan karakter lebih tepat digali melalui pengalaman subjektif dan pemaknaan mahasiswa, bukan angka kuantitatif. Desain ini juga memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika pembelajaran PKn dan persoalan etis yang belum banyak diungkap studi sebelumnya, sehingga relevan untuk mengisi kesenjangan penelitian di tingkat perguruan tinggi (Hasan & Hilalludin, 2025).

Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria mahasiswa yang telah mengikuti PKn, memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan kelas, serta bersedia diwawancara (Hilalludin & Winarni, 2025). Mahasiswa yang belum pernah mengambil PKn dikecualikan agar data tetap relevan. Sebanyak 15 mahasiswa dipilih karena mampu memberikan informasi kaya. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-struktur dan peneliti sebagai human instrument. Wawancara dilakukan 20–30 menit, direkam dengan izin peserta, dan dilengkapi catatan lapangan. Keabsahan data dijaga melalui member checking (Raharja & Hilalludin, 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan thematic analysis dengan langkah familiarisasi, open coding, axial coding, dan pembentukan tema. Dari analisis muncul empat tema utama: pemahaman nilai antikorupsi, efektivitas pembelajaran PKn, hambatan internalisasi nilai integritas, dan rekomendasi penguatan pendidikan antikorupsi (Zohri & Hilalludin, 2025). Seluruh tema kemudian dirumuskan dalam uraian naratif yang menghubungkan pengalaman mahasiswa dengan teori pendidikan karakter. Melalui metode ini, penelitian memperoleh gambaran yang jelas dan kredibel tentang bagaimana PKn berperan dalam pembentukan karakter antikorupsi mahasiswa (Wahyudin et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mahasiswa terhadap Nilai Antikorupsi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 15 mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka mengenai nilai antikorupsi mencakup aspek yang luas dan tidak terbatas pada tindakan hukum. Sebagian besar responden mengaitkan antikorupsi dengan sikap moral dan integritas pribadi, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesadaran untuk tidak menyalahgunakan amanah dalam kehidupan sehari-hari(Bintang Auliya Tyananda et al., 2025). Sebanyak 13 dari 15 mahasiswa (86,7%) menekankan bahwa kejujuran adalah inti utama dari nilai antikorupsi, sementara 10 orang (66,7%) menyoroti pentingnya disiplin dan 9 orang (60%) menambahkan aspek tanggung jawab sosial. Nilai amanah dan kepedulian terhadap sesama juga muncul, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil.

Tabel berikut menyajikan sebaran tema yang paling sering muncul dari hasil wawancara:

Aspek Nilai Antikorupsi yang Dominan	Jumlah Mahasiswa (N=15)	Persentase
Kejujuran	13	86,7%
Disiplin	10	66,7%
Tanggung jawab	9	60%
Amanah / Integritas	7	46,7%
Kepedulian sosial	5	33,3%

Dari data tersebut tampak bahwa kejujuran menjadi nilai utama yang paling dipahami mahasiswa sebagai wujud sikap antikorupsi. Mereka menilai bahwa perilaku jujur merupakan bentuk nyata dari integritas diri dan menjadi dasar untuk membangun kehidupan akademik yang bersih. Temuan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman konseptual yang kuat tentang nilai antikorupsi, meskipun masih diperlukan proses internalisasi agar nilai tersebut menjadi kebiasaan dan bagian dari identitas moral mereka (Zulkarnain et al., 2024).

Dalam konteks teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, sebagian besar mahasiswa berada pada tahap konvensional, yaitu memahami dan menyetujui nilai-nilai moral yang baik, tetapi penerapan nyatanya masih bergantung pada tekanan sosial dan contoh dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran dan budaya kampus yang mendorong mahasiswa untuk naik ke tahap moral yang lebih tinggi, di mana keputusan etis diambil berdasarkan prinsip integritas yang disadari secara pribadi, bukan karena pengaruh eksternal.

Hambatan dan Strategi Penguatan Nilai Antikorupsi di Lingkungan Kampus

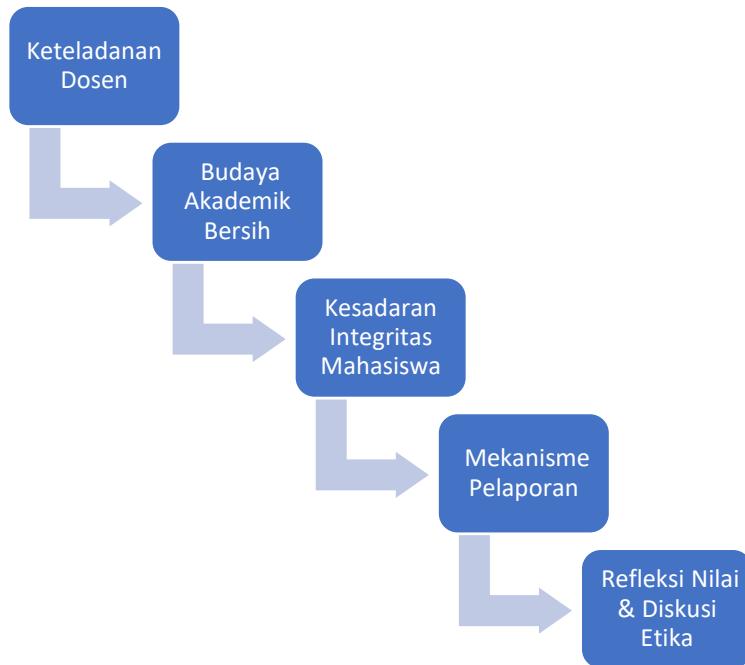
Meskipun mahasiswa menunjukkan pemahaman yang baik tentang nilai antikorupsi dan mengakui peran PKn dalam menumbuhkan kesadaran

moral, penerapan nilai tersebut di lingkungan kampus masih menghadapi beberapa hambatan nyata. Berdasarkan wawancara, sebagian besar mahasiswa, yaitu 10 dari 15 orang (66,7%), menyebut bahwa budaya sosial kampus masih permisif terhadap perilaku tidak jujur. Praktik seperti mencontek, titip absen, dan manipulasi laporan dianggap wajar oleh sebagian mahasiswa karena telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan(Arifiyanti et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran integritas belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya akademik yang melekat. Selain itu, 8 mahasiswa (53,3%) menyampaikan bahwa kampus belum memiliki sistem pelaporan pelanggaran etika yang jelas, serta kurangnya mekanisme kontrol dan sanksi terhadap perilaku tidak jujur. Kondisi tersebut membuat pelanggaran kecil sering kali diabaikan, padahal kebiasaan kecil inilah yang dapat menumbuhkan sikap permisif terhadap korupsi dalam skala lebih besar (Putri et al., 2024).

Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa upaya memperkuat nilai antikorupsi tidak dapat hanya mengandalkan pembelajaran formal di kelas, tetapi juga membutuhkan keteladanan dari dosen dan pimpinan kampus. Dosen dianggap memiliki posisi strategis sebagai panutan moral, sehingga sikap dan perilaku mereka akan sangat berpengaruh terhadap internalisasi nilai mahasiswa. Keteladanan dosen dalam hal kedisiplinan, transparansi penilaian, dan kejujuran akademik menjadi cerminan nyata dari nilai antikorupsi yang diajarkan (Hilalludin, 2025).

Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya membangun mekanisme pelaporan etika yang jelas dan aman, agar setiap bentuk pelanggaran akademik dapat ditindaklanjuti secara objektif tanpa menimbulkan ketakutan atau stigma bagi pelapor(Rizqiyanto et al., 2024). Lebih jauh, kegiatan refleksi integritas melalui diskusi, debat etika, dan mentoring moral juga diperlukan agar mahasiswa dapat menginternalisasi nilai antikorupsi melalui proses berpikir reflektif dan pengalaman bersama(Puspa & Coryanata, 2024).

Bagan berikut menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang dapat memperkuat budaya integritas di kampus:



Bagan ini menunjukkan bahwa ketiga faktor utama keteladanan, sistem pelaporan, dan refleksi nilai saling berinteraksi dan membentuk siklus positif yang berujung pada penguatan budaya integritas di lingkungan kampus. Keteladanan berperan sebagai fondasi moral, mekanisme pelaporan sebagai kontrol sosial, dan refleksi nilai sebagai proses internalisasi pribadi. Jika ketiganya berjalan beriringan, maka akan terbentuk lingkungan akademik yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi (Sugari et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan integrasi nilai antikorupsi dalam PKn sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan sistem kelembagaan kampus. Pembelajaran yang efektif akan menjadi lebih bermakna apabila didukung oleh budaya akademik yang jujur dan sistem pengawasan yang tegas. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi harus dipahami bukan hanya sebagai materi ajar, tetapi sebagai gerakan

moral dan budaya institusional yang terwujud dalam kebijakan, perilaku, serta tata kelola kampus yang berintegritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran moral mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 15 mahasiswa, nilai-nilai yang paling dipahami meliputi kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Materi mengenai etika publik serta studi kasus dianggap memberikan pemahaman konseptual yang jelas tentang pentingnya integritas sebagai fondasi perilaku warga negara. Meskipun demikian, mahasiswa menilai bahwa pembelajaran PKn masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku antikorupsi dalam praktik nyata. Keterbatasan metode pembelajaran, kurangnya aktivitas aplikatif, dan budaya kampus yang belum optimal dalam mendukung internalisasi nilai integritas menjadi faktor penghambat efektivitas program pendidikan antikorupsi.

Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi perlu diimplementasikan sebagai budaya akademik yang sistematis, bukan hanya sebagai materi pelajaran. Perguruan tinggi perlu menguatkan peran dosen sebagai teladan moral, mengembangkan kurikulum yang lebih reflektif, kontekstual, dan berbasis pengalaman melalui proyek sosial, kajian kasus nyata, diskusi publik, serta evaluasi karakter. Selain itu, diperlukan sistem pelaporan etika yang transparan untuk mendorong keberanian mahasiswa melawan tindakan tidak berintegritas. Sebagai langkah ke depan, komitmen semua unsur perguruan tinggi sangat diperlukan dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi harus menjadi gerakan moral yang melibatkan seluruh sivitas akademika untuk membentuk lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan beretika. Dengan demikian, PKn dapat menjadi instrumen strategis dalam

mencetak generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan siap menjadi agen perubahan menuju terciptanya masyarakat yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifyanti, J., Suhartini, E., Mulyono, J., & Hutama, P. (2022). Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa: Pendisiplinan Tubuh dan Tantangan Sengkarut Perilaku. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(03), 490–496. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i03.1910>
- Bintang Auliya Tyananda, Ryan Dwi Prayoga, Tita Ester, Mohammad Fauzil Adhim, Alfira Nur Adella, Nur Hafizah, Dhea Maiza Azzahra, Putri Shandefi, Marisa Zahrani, Eni Lutviana Fadila, & Naifa Adelia Nurahmi. (2025). Pendidikan Antikorupsi sebagai Upaya Membangun Generasi Berintegritas. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, 2(1), 104–113. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i1.161>
- Ginanjar, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122–132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>
- Hasan, L., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi Nilai Syariah dalam Ekonomi Digital dan Gaya Hidup Muslim Kontemporer. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55–66.
- Hasanah, U., & Dewantara, A. H. (2022). *The Faculty Awareness on Plagiarism Issue: 1st World Conference on Social and Humanities Research (W-SHARE 2021)*, Makassar, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220402.009>
- Hilalludin, H. (2025). Manajemen Kyai VS Pesantren Moderen Sebagai Sebuah Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 451–463.
- Hilalludin, H., & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus Dusun Nganyang. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 106–115.
- Hutabarat, S. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pancasila di Universitas Budi Darma Medan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(2), 98–104. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i2.1013>
- Khotimah, K., Afifah, Salsa Indria Putri, & Langgeng Sri Handayani. (2024). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa. *JEMSI*

- (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*), 10(2), 801–807. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2057>
- Muharam, R. S., Sudaryatie, S., & Prasetyo, D. (2022). Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Yustitiabelen*, 8(1), 59–69. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.524>
- Puspa, D., & Coryanata, I. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan Whistleblowing pada Kecurangan Akademik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4900–4918. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1061>
- Putri, P. P., Heryadi, A., & Puspitasari, D. (2024). Peningkatan Kejujuran Akademik pada Mahasiswa melalui Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi: JPPP*, 13(1), 17–24. <https://doi.org/10.21009/JPPP.131.03>
- Raharja, A., & Hilalludin, H. (2025). The Effectiveness of Islamic Educational TikTok Content by @bachrulalam in Enhancing Adolescents' Interest in Learning Arabic. *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 77–88.
- Rizqiyanto, S., Anwar, M. C., & Antuli, R. R. (2024). Corruption in Higher Education; A Comparative Studies on Whistleblowing System between University of Stanford and Universitas Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 12(1), 197–210. <https://doi.org/10.15408/jch.v12i1.38693>
- Siti Fadilahtul Hidayah & Aos Kuswandi. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Studi Deskriftif di Universitas Islam 45 Bekasi. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 1(2), 36–48. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3755>
- Subagyo, A. dan I. K. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Equilibrium* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Mariyani, E. (2025). *Perbedaan Pesantren Tradisional dan Pesantren Modern di Indonesia*.
- Syahputra, Y. B., Theotama, G., & Hapsari, A. N. S. (2024). Anti-Corruption Education, Is It Important? *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 197–210. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i2.327>
- Wahyudin, M., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Peran Dosen dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa STIT Madani. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 130–136.
- Witarsa, W. (2023). Optimizing Anti-Corruption Education in Higher Education: Enhancing Awareness and Promoting Action against

- Corruption among University Students. *Journal of Social Work and Science Education*, 4(3), 897–905.
<https://doi.org/10.52690/jswse.v4i3.485>
- Zohri, M., & Hilalludin, H. (2025). Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33–44.
- Zulaiha, A. R., Hernawan, A. H., & Dewi, L. (2025). The effect of anti-corruption character education on educational integrity. *Inovasi Kurikulum*, 22(1), 133–146. <https://doi.org/10.17509/jik.v22i1.77126>
- Zulkarnain, M., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Siswa di Sekolah. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(3), 117–125.